BAB I

PENDAHULUAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

1.1. Sejarah berdirinya PT. PLN (Persero)

Menurut berbagai keterangan yang ditemukan, menyatakan bahwa cahaya listrik mulai masuk di Indonesia sekitar nabad ke-19 yaitu pada zaman penjajahan Hindia Belanda. Di tahun 1905 di Jawa Barat Khususnya di kota Bandung berdiri perusahaan yang mengelola pendirian tenaga listrik bagi kepentingan public. Nama perusahaan itu adalah ***Bandoengsche Electriciteit Maatschappij (BEM)***. Dalam perjalanannya, BEM pada 1 januari 1920 berubah menjadi perusahaan Perseroan menjadi *Gemeenschapplijk Electricteit Bedrijf Voor Bandoeng (GEBEO)* yang pendirinya dikukuhkan melalui akte *Notaries* Mr.Andrian Hendrik Van aphuise dengan no : 213 tanggal 31 Desember 1919.

Setelah kekuasaan Penjajah Beralih ke tangan pemerintahan Jepang, diantara rentang waktu 1942-1945. Perindustrian tenaga listrik dilaksanakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha dengan wilayah kerja diseluruh Pulau Jawa.

Sejarah Kembali mencatat dengan rapih, perjuangan fisik kemerdekaan berhasil membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan .

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tiba saat penyerahan kedaulatan dari pemerintahan Hindia Belanda kepada Republik Indonesia.Tahun 1957 merupakan titik tolak dan awal dari pengelolaan dan penguasaan perlistrikan di seluruh Indonesia yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia, karena pada tahun tersebut dimulai adanya Nasionalisasi perusahaan Asing di Indonesia.

Maka pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh pemerintah RI yang dikukuhkan dengan peraturan pemerintah No. 86 tahun 1958 Jo Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda yang pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 1961 dibentuk Badan Pemimpin umum Perusahaan Listrik Negara (BPI-PLN), sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Kemudian istilah PLN Bandung diganti menjadi PLN Exploitas XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat.

Sejarah kelistrikan di Jawa Barat terus berkembang sejalan dengan perubahan dan perkembangan daerah yang terus terjadi memasuki era 1990an dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun1994 tanggal 16 Juni 1994. Untuk memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan kelistrikan yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, maka keluarlah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.28k/010/DRI/2001

Tanggal 20 Februari 2001. yang menjadi landasan hukum perubahan nama PT. PLN (Persero). Distribusi Jawa Barat pada akhirnya, dengan mengacu keputusan Direksi PT.PLN (Persero) unit Nomor : 120k/010/ DIR 2002 tanggal 27 Agustus 2002 PT. PLN

(Persero) unit Bisnis distribusi Jawa Barat dan berubah lagi namanya menjadi PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, dimana wilayah kerjanya meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten hinga saat ini.

Visi, Misi Filosofi dan tujuan Perusahaan.

Visi Perusahaan.

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang tumbuh berkembang, unggul dan terpercaya engan bertumpu pada potensi insani.

Misi Perusahaan.

1. Melakukan bisnis kelistrikan dan bidang usaha terkait yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, karyawan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas. Kehidupan manusia.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Filosofi Perusahaan.

Filosofi adalah landasan utama sebagai keyakinan untuk mewujudkan misi dan visi perusahaan; landasan filosofi PLN unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah:

"Mempunyai Komitmen yang tinggi terhadap kepentingan pelanggan dengan mendasari SDM sebagi sumber daya penting perusahaan."

Tujuan Perusahaan.

Tujuan PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dan Banten dalam melakukan restrukturisasi ini adalah pertama untuk meningkatkan efisiensi dan kedua kepuasan pelangan meningkat, dapat diuraikan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang sebagai berikut:

- Jangka Pendek.
  a. Mempercepat pemulihan kesehatan keuangan perusahaan.
  b. Membentuk Unit Pelayanan Pelanggan (UPP) sebanyak 7 unit migrasi dari rating/rayon yang ada, dan sebagai pilot projek ditetapkan 2 unit yaitu UPP Bandung Timur dan UPP Padalarang.
  c. Membentuk Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) sebanyak 15 unit migrasi dari Wire Cabang (Bagian Distribusi dan Bagian Konstruksi).
  d. Pilot proyek dalam mendirikan UPP dan UPJ yaitu cabang Bandung, cabang Majalaya, cabang Cimahi (BMC), koordinasi oleh tim BMC.
  e. Menyiapkan 1 Unit Arena Bandung Raya (Embrio UPD) Bandung, Bale Endah, Cimahi dan Sumedang.
  f. Menyiapkan PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat menjadi UBD dengan organisasi yang baru, rekayasa ulang bisnis proses, mekanisme niaga persiapan SDM dan IT.
- Jangka Menengah
  a. Meningkatkan Kesehatan keuangan Perusahaan.
  b. Melaksanakan proses transformasi organisasi melalui pembentukan 1 area yang membawahi UPJ-UPJ se Bandung Raya.
  c. Menyiapkan UPP baru sesuai perkembangan yang ada.
  d. Menyiapkan 4 area lainnya yaitu Bogor, Karawang/Bekasi, Cirebon dan Banten.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

e. Memberdayakan SDM dan IT untuk rekayasa ulang bisnis proses mekanisme niaga dan sistem manajemen yang terpadu antara UPP, UPJ, AREA dan UBD Jawa Barat.

- Jangka Panjang

a. meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan yang siap menyongsong era kompetensi.

b. Melaksanakan proses tranformasi organisasi melalui:

   - Pembentukan 5 area yang membawa UPJ-UPJ.
   - Pembentukan 15 unit Pelayanan Pelanggan (UPP).
   - Pembentukan 84 unit pelayanan Pelanggan (UPP).

c. Memperdaya SDM dan IT untuk rekayasa ulang bisnis proses, mekanisme niaga dan sistem manajemen.

d. Menyampaikan pembentukan unit *Non Core Business.*

e. Mentransrormasi UBD Jawa Barat dan Banten menjadi anak perusahaan (diperkirakan setelah tahun 2005).

Arti Logo PT. PLN (PERSERO) DJBB

Arti logo PT.PLN

Logo atau simbol merupakan bagian dari identitas perusahaan (*corporate identity*), sedangkan yang di maksud dengan identitas perusahaan adalah suatu cara atau suatu hal yang memungkinkan perusahaan dapat dikenal dan dibedakan dari perusahaan lain.

1. Gambar lambang PLN tercantum dalam suatu bidang datar
   a. Berwarna kuning keemasan
   b. Berbentuk segiempat. Berskala ukuran lebar : Panjang = 3:4
   c. Tanpa garis pinggir bila diperlukan penggambaran segi empat pada (b) dapat digunkan garis pinggir senagai batas.
   d. Tanpa tulisan listrik negara ataupun tulisan lain di dalamnya.
2. Gambar atau lambang PLN terdiri dari :
   a. Petir atau kilat yang berbentuk atas tebal dan meruncing desebelah berwarna merah darah dan memotong atau menembus ketiga garis gelombang.
   b. Tiga buah gelombang yang terbentuk sinusoida (dua setengah perioda), berwarna biru laut, tersusun secara sejajar dalam arah mendatar, terletak ditengah-tengah segi empat pada dasar kuning keemasan.
3. Gambar atau lambang diartikan senagai berikut :
   a. Petir atau kilat melambangkan tenaga listrik yang terkandung didalamnya.
   b. Gelombang yang digunakan dalam lambang PLN karena segala macam tenaga (energi) dapat dinyatakan sebagai gelombang (cahaya listrik, akuistik, dll). Kegiatan PLN antara lain mencakup konversi segala macam tenaga (energi) menjadi tenaga listrik.
   c. Tiga buah gelombang sejajar diartikan 3 sikap karyawan PLN dalam melaksanakan tugas Negara bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat. Artinya yang lain bahwa pelaksanaan distribusi tenaga listrik harus serempak.

4. Warna lambang diartikan sebagai berikut:
   a. Warna kuning keemasan melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, serta agunganya kewajiban PLN.
   b. Warna merah darah melambangkan keberanian dan dinamika dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran pembangunan.
   c. Warna biru laut melambangkan kesetiaan dan pengabdian pada tugas untuk menuju dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti dinyatakan dalam Peraturan pemerintah No 18 tahun 1972.
5. Penempatan Tulisan-tulisan yang menyatakan satuan PLN

   Guna menyatakan satuan-satuan PLN pada lambang PLN maka jika dianggap perlu, dapat di tempatkan tulisan-tuliasan yang menyatakan satuan-satuan yang bersangkutan,dengan keterangan sebagai berikut:
   a Pada Papan nama PLN di cantumkan di sebelah kanan lambing tersebut.
   b. Pada benda-benda peralatan, kendaraan , dsb, di sebelah atas lambing dicantumkan satu induknya (PLN Pusat, Wilayah, Proyek,dsb) di bawah lambang di cantumkan satuan eselon berikutnya(PLTN Cab Sekt, dsb).
6. Standar bentuk lambang PLN

   Standar bentuk lambang serta ukuran-ukuran dibentu sebagaimanan tertera pada gambar, semua di buat sesuai dengan ukurannya dari gambar tersebut

1.2 Sejarah Divisi Humas PT PLN (Persero) DJBB

Menurut Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara tahun 1978 No 030/DIR/78 . Pada tanggal 20 Juli 1978 Humas merupakan bagian dari Bidang Deputy Pengusaha yang membawahi Seksi Kepegawaian, Seksi Kesekertariatan dan Seksi Hukum dan Perizinana Perusahaan. Pada tahun ini bertolak dari surat keputusan tersebut Humas berada di bawah bagian seksi Hukum dan Perizinan Perusahaan.

Pada tahun 1985 Humas mengalami perubahan kembali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara tahun 1985 No 026/DIR/85. Pada tanggal 23 Januari 1985 Humas berada di bawah Kepala Bagian Hukum dan Humas dengan Pimpinan Deputy Bidang Perusahaan.

Tahun 1993 menurut Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara tahun 1993 No 0153.K/023/DIR/93 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat Bab IV Pada Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unsur dalam susunan Organisasi Distribusi. Bab 6 Bidang Kepegawaian Administrasi Pasal 131 yang berbunyi " Tugas pokok bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat atau Humas adalah merealisasikan dan menyiapkan produk hukum dan Peraturan Perundang-undangan Verifikasi Produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan bantuan Hukum serta Kegiatan Hubungan Masyarakat".

Pada tahun 2001 Humas mengalami perubahan kembali dengan merujuk kepada Surat Keputusan Direksi No 28/010/DIR/2001, Manager Administrasi, Hukum dan Komunikasi dibantu oleh Deputi Manager Sekertariat dan umum , Deputi Manager Hukun, Deputi Manager Public Relation dan jabatan kepakaran di bidang perencanaan sarana kerja, Telekomunikasi dan K3, Perencanaan Sarana Gedung/Bangunan dan sarana

penunjang serta jabatan operatif yang uranian jabatan dan informasi tenaga kerjanya di tetapkan oleh *General Manager*.

Sumber : Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero)DJBB tahun 1978,1985,1993 dan 1993

1.3 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) DJBB

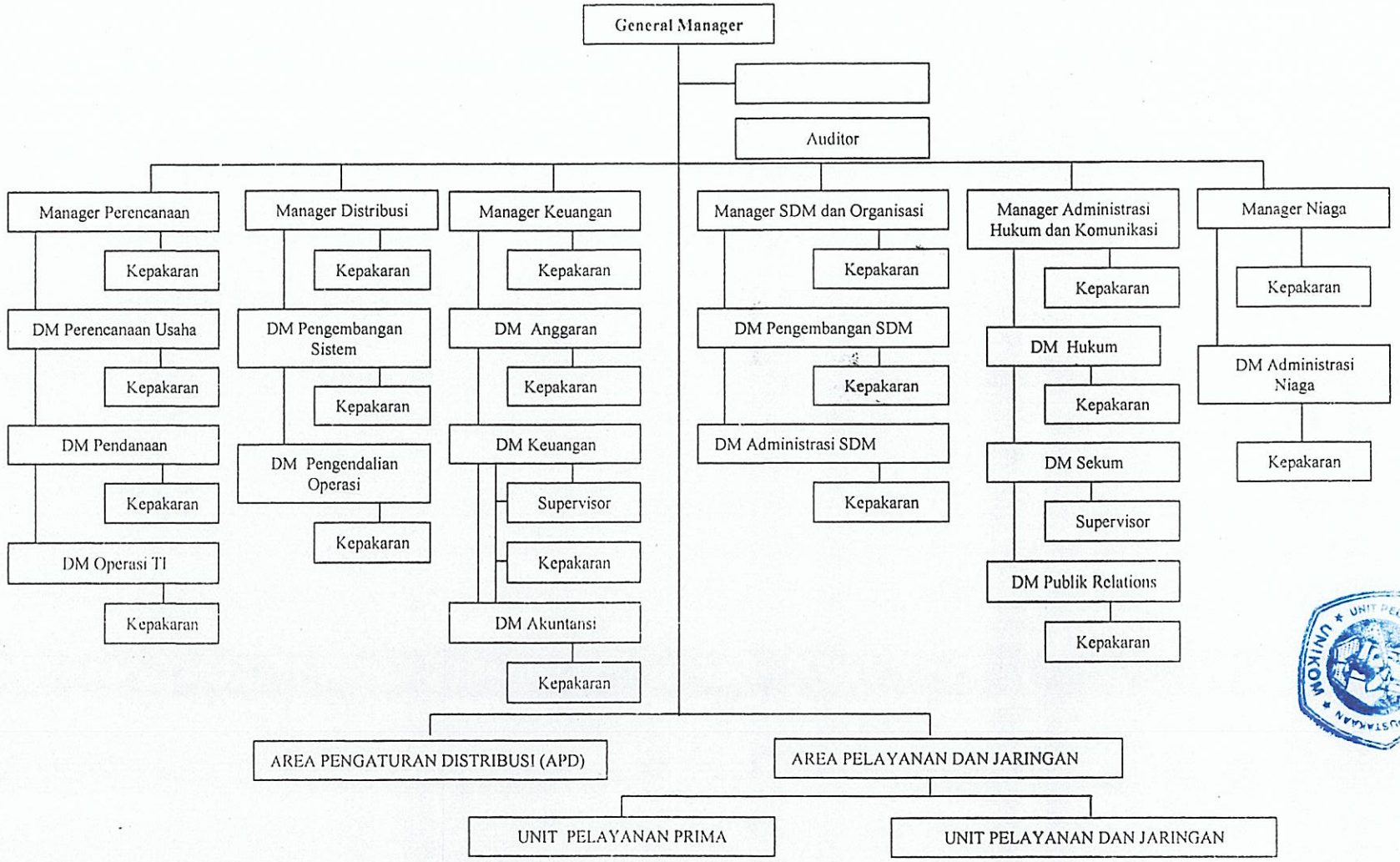
Struktur organisasi perusahan merupakan suatu gambaran yang menunjukan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau anggota. Struktur organisasi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat merupakan organisasi garis, fungsional, dan staff jenjang manajemen, meliputi unsur pimpinan, unsur pengawasan, unsur pelaksana, selain itu ada juga *control intern* yang berada dibawah serta tanggung jawab langsung kepada konsumen, dapat dilihat secara keseluruhan bahwa susunan organisasi di PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jawa Barat sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan adalah *General Manager*
b. Unsur Pembantu Pimpinan yang meliputi bidang-bidang :
    1. Perencanaan dan Pengembangan Usaha
    2. Distribusi
    3. Niaga
    4. Keuangan
    5. Organisasi dan SDM
    6. Administrasi, Hukum dan Komunikasi
c. Unsur Pelaksanan, meliputi :
    1. Cabang /Unit
    2. Area

Untuk lebih jelas Struktur Organisasi PT PLN (Persero) UBD Jawa Barat dan Banten dapat dilihat pada Bagan 1.1 berikut :

BAGAN 1.1 STRUKTUR ORGANISASI

PT PLN (Persero) Distrbusi Jawa Barat dan Banten



UNIKOM

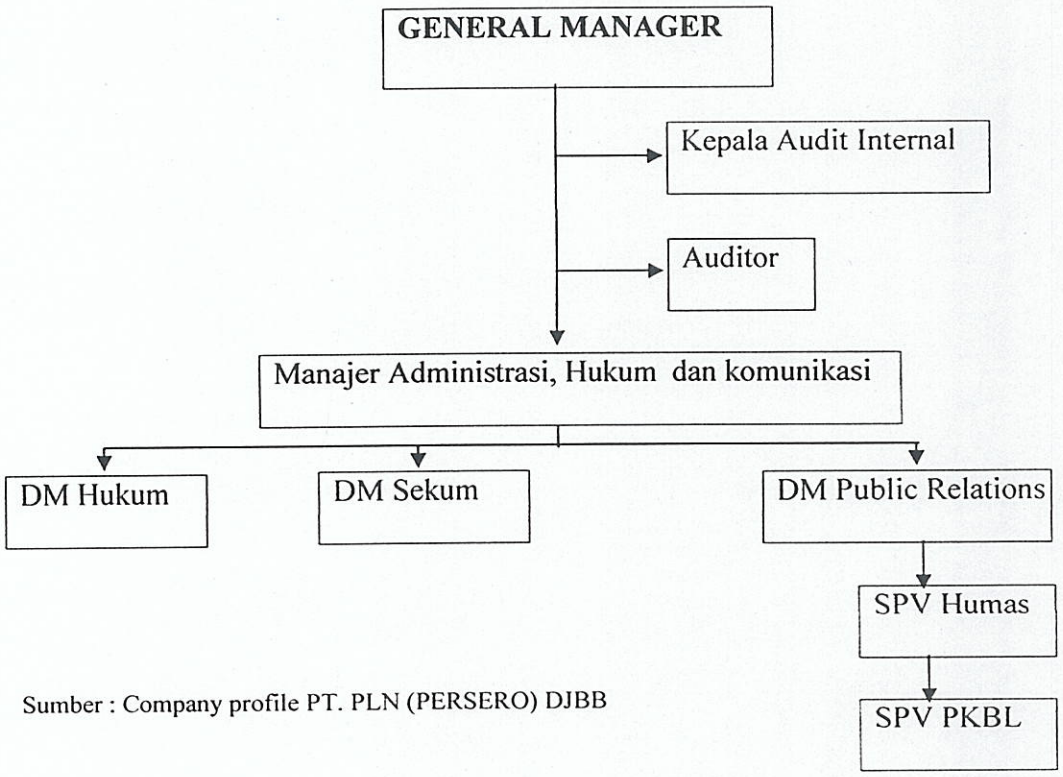
1.4 Stuktur Divisi Humas PT.PLN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana keputusan Direksi No 28/010/DIR/2001, Manager Administrasi, Hukum dan Komunikasi dibantu oleh Deputi Manager Sekertariat dan umum , Deputi Manager Hukun, Deputi Manager Public Relation dan jabatan kepakaran di bidang perencanaan sarana kerja, Telekomunikasi dan K3, Perencanaan Sarana Gedung/Bangunan dan sarana penunjang serta jabatan operatif yang uranian jabatan dan informasi tenaga kerjanya di tetapkan oleh *General Manager*.

Untuk lebih jelas Struktur Divisi PT PLN (Persero) Jawa Barat dan Banten dapat dilihat pada Bagan 1.2 berikut :

BAGAN 1.2 Stuktur Divisi Humas

PT PLN (Persero) Jawa Barat Dan Banten



Sumber : Company profile PT. PLN (PERSERO) DJBB

1.5. *Job Description* PT PLN (Persero) Jawa Barat Dan Banten

Dalam tataran praktisnya, masing-masing bagian memiliki *job description* yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut :

a. Bidang Perencanaan dan pengembangan Usaha

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab senagaimana keputusan direksi No. 28/010/DIR/2001, manajer perencanaan dan pengembangan usaha di Bantu oleh Deputi Manajer Perencanaan Perusahaan, Deputi Manajer Pendanaan dan Jabatan Kepakaran di bidang perkembangan usaha serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan informasi tenaga kerjanya di tetapkan *General Manager* .

1. Deputi Manager Perencanaan Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan perencanaan *corporate* (*business plan*) serta rencana kerja dan angggaran perusahaan dari Unit Bisnis Distribusi serta melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja.
2. Deputi Manager Pendanaan bertanggung jawab atas penyediaan sumber dana untuk mendukung rencana kegiatan investasi dana operasi, melakukan analisa justifikasi investasi serta menyiapkan penerbitan SKKi dan SKKo untuk penyusunan skala prioritasnya.
3. Kepakaraan Pengembangan Usaha bertanggung jawab atas penyusunan rencana pengembangan usaha/ analiansi usaha sesuai kaidah bisnis yang sehat.

b. Bidang Niaga

Dalam melaksanakan tugas pokok dantanggung jawab sebagaimana keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, manajer Niaga dibantu oleh Deputi Manager Administrasi Niaga dan jabatan kepakaran di bidang Bisnis proses dan Sistem

Prosedur Pelayanan, Regulasi pelayanan dan P2TL, sistem Pelayanan Pelanggan Potensial, Sistem Pelayanan Pelangan Umum, Pengembangan Pemasaran dan Produk unggulan, riset dan Intelegent pasar, negosiasi dan Transaksi Niaga, DSA dan Pentaripan serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan informasi tenaga kerjanya ditetapkan *General Manager*:

1. Deputi Manager Administrasi Niaga bertanggung jawab atas pencapaian kinerja niaga (rasio operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan, dan susut tenaga listrik) dan pengaturan transaksi niaga dan kontrak bisnis yang dilaksanakan di UPP, UPT / Cabang, AREA yaitu transaksi jual/beli/produksi.
2. Kelompok kepakaran Pengembangan Sistem Pelayanan yang meliputi :
   2.1. Kepakaran Bisnis Proses dan Sistem Prosedur Pelayanan bertanggung jawab atas pembuatan bisnis proses unit pelaksana, antar unit pelaksana dan pembuatan sistem dan prosedur pelayanan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
   2.2 Kepakaran Regulasi Pelayanan bertanggung jawab atas penyiapan standar, regulasi pelayanan dan melaksanakan monitoring / evaluasi untuk urusan penyempurnaan atau perbaikan standar dan regulasi pelayanan.
   2.3. Kepakaran Sistem Pelayanan Pelanggan Potensial bertanggung jawab atas tersedianya system pelayanan dan memfasilitasi UPP/UPT/Cabang dan AREA dalam penyelenggaraan pelayanan dan

kontrak bisnis dengan pelanggan potensial untuk pencapaian kepuasan pelangggan dan target peningkatan pendapat.

2.4. Kepakaran Sistem Pelayanan Pelanggan Umum bertangggung jawab atas tersedianya system pelayanan dan memfasilitasi UPP/UPT/ Cabang dan AREA dalam menyelenggarakan pelayanan dan konrak bisnis dengan pelangggan umum untuk pencapaian kepuasan pelanggan dan target peningkatan pendapatan.

2.5 Kepakaran Riset Kepuasan Pelanggan beranggung jawab atas penyelengggaraan riset/survey kepuasan pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan guna peningkatan pelayanan pelanggan.

2.6 Kepakaran Peningkatan Kompetensi Pelayanan dan Niaga bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi pelayanan dan niaga unit-unit pelaksana dalam rangka pencapaian kinerja niaga (rasio operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan dan susut).

3. Kelompok Kepakaran Pengembangan Niaga yang meliputi :

3.1 Kepakaran pengembangan Pemasaran dan Produk Unggulan bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan pemasaran oleh unit pelaksana dengan memfasilitasi dan menyiapkan inovasi/produk unggulan untuk pencapaian target penjualan / pendapatan dan kepuasan pelanggan.

3.2 Kepakaran Riset dan Intelegent pasar bertanggung jawab atas penyelenggaraan riset dan intelegent pasar untuk mengetahui dan

rencana pengembangan pasar untuk meningkatkan penjualan/pendapatan dan kepuasan pelanggan.

3.3 Kesepakatan Negosiasi dan Transaksi Niaga bertanggung jawab atas pelaksanaan negosiasi dan transaksi niaga/kontrak bisnis dengan pihak eksternal UBD dan memfaslitasi transaski niaga kontrak bisnis di unit pelaksana.

3.4 Kepakaran Tarif/Harga bertanggung jawab atas pembuatan rumusan dan ke kinerja pentaripan niaga yang dapat menguntungkan perusahaan.

3.5 Kepakaran P2TL/Penertiban Niaga bertanggung jawab atas pengaturan pelaksanaan P2TL/Penerbitan Niaga dalam rangka pencapaian peningkatan target niaga (rasio operasi, umur piutang,pendapatan, penjualan dan susut tenaga kerja).

3.6 Kepakaran Peningkatan Produktivitas (EDP) bertanggung jawab atas peningkatan produktivitas (EDP) unit-unit pelaksana dalam pencapaian kinerja niaga (rasio operasi, pendapatan penjualan dan susut tenaga kerja).

c. Bidang Distribusi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan bertanggung jawab sebagaimana Keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, Manager Distribusi dibantu oleh Deputi Manager Perencanaan Sistem, deputi Manager Operasi Distribusi, dan jabatan kepakaran di bidang Pengembangan Konstruksi, Konstruksi Listrik Pedesaan,

Metering dan Proteksi, Telekomunikasi dan Scada serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan format tenaga kerjanya ditetapkan *General Manager*:

1. Deputi Manager Pengembangan Sistem bertanggung jawab atas perencanaan sistem distribusi yang andal dan kebutuhan gardu induk untuk memenuhi kebutuhan beban , serta upaya penurunan susut distribusi (susut teknis).
2. Deputi Manager Pengendalian Operasi bertanggung jawab atas perencanaan sistem pengoperasian jaringan distribusi berdasarkan standar pelaksana kegiatan operasi yang aman , handal dan efisien.
3. Kelompok Kepakaran *Enginering* dan Logistik,meliputi :
   - 3.1 Kepakaran Marketing dan Proteksi betanggung jawab atas prosedur dan mekanisme, koordinasi sistem proteksi dan metering serta menyiapkan spesifikasi teknik peralatan metering dan proteksi.
   - 3.2 Kepakaran Scada dan Telekomunikasi bertanggung jawab atas perencanaan sistem operasional telekomunikasi dan scada pada sistem distribusi 20 VK.
   - 3.3 Kepakaran Pemeriksa dan Penggunaan Tenaga Listrik (PPTL) bertanggung jawab atas tersedianya program PPTL.
   - 3.4 Kepakaran Peningkatan Kinerja Operasi bertanggung jawab atas rekomendasi peningkatan kinerja operasi distribusi.
   - 3.5 Kepakaran Kwalitas Peralatan Listrik bertanggung jawab atas rekomendasi penggunaan peralatan listrik.

3.6 Kepakaran Pengembangan Konstruksi bertanggung jawab atas tersedianya standar konstruksi dan spesifikasi teknis untuk rencana pengembangan sistem distribusi.

3.7 Kepakaran Logistik bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan tentang pola operasional pergudangan untuk kelancaran tersedianya material untuk mendukung pembangunan konstruksi.

d. Bidang Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaiman Keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, Manager Keuangan di bantu oleh Deputi Manager Akutansi dan jabatan kepakaran di bidang analisa dan evaluasi sistem Keuangan serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan formasi kerjanya ditetapkan *General Manager.*

1. Deputi Manager Pengendalian Anggaran bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dan monitoring penggunaan data.
2. Deputi Manager Pengolahan Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan dan arus kas secara akurat serta melaksanakan pengembangan sistem manajemen keuangan sesuai dengan prinsip manajemen keuangan yang sehat mengelola keuangan yang menggunakan serta menyiapkan data untuk laporan keuangan.
3. Deputi Manager Akutansi bertanggung jawab dalam menyiapkan informasi akutansi yang akurat dan tepat waktu untuk semua pihak dan membantu

manajemen dalam melaksanakan operasi perusahaan secara efisien dan efektif.

4. Kepakaran Keuangan bertanggung jawab atas merencanakan pola pengelolaan dana yang menguntungkan serta melakukan analisa dan evaluasi keuangan.

e. Bidang Organisasi dan Sember Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagai mana keputusan Direksi No 28/ DIR/010/2001, Manager Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Deputi Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan jabatan kepakaran di bidang manajemen Sumber Daya Manusia serta Jabatan Operatif yang uraian jabatan dan informasi tenaga kerjanya ditetapkan *General Manager*.

1. Deputi Manager Administrasi Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan penghasilan dan emolument, kesejahteraan dan kesehatan pegawai serta pensiunan dan sistem penggelolaan data, penyajian informasi, dan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pegawai yang aktual .
2. Deputi Manajemen Pengembangan sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompeten melalui jenjang karir yang jelas.
3. Kesepakatan Manajemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas pengembangan sistem sumber daya manusia.

f. Bidang Administrasi, Hukum dan Komunikasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana keputusan Direksi No 28/010/DIR/2001, Manager Administrasi, Hukum dan Komunikasi

dibantu oleh Deputi Manager Sekertariat dan umum , Deputi Manager Hukun, Deputi Manager Public Relation dan jabatan kepakaran di bidang perencanaan sarana kerja, Telekomunikasi dan K3, Perencanaan Sarana Gedung/Bangunan dan sarana penunjang serta jabatan operatif yang uranian jabatan dan informasi tenaga kerjanya di tetapkan oleh *General Manager*.

a. Menyusun Kebijakan dan mengelola komunikasi Kemasyarakatan dan pelanggan baik Internal ataupun Eksternal
b. Menyusun kebijakan fasilitas kerja, sistem pengamanna dan manajemen kantor
c. Menyusun kebijakan K3,Lingkungan dan *community devolepment*
d. Menyusun kebijakan Administrasi
e. Menyusun hukum dan peraturan-peraturan perusahaan
f. Memberi advokasi dalam bisnis energi listrik dan ketenaga kerja.
g. Menyusun Standar fasilitas kantor.
h. Mengelola asset tanah dan bangunan serta sarana kerja.
i. Mengelola kesekertariatan dan rumah tangga kantor induk.
j. Menusun laporan manajemen dibidangnya

g. Area Pelayanan Dan Jaringan

Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta membuat laporan atas pencapaian pendapat penjualan tenaga listrik, pelayanan pelanggan pengoprasian, pemeliharaan jaringa, distribusi di daerah kerjanya secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik untuk mencapai kinerja unit.

h. Area Pengaturan Distribusi

Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi surat laporan atas kegiatan operasi pengaturan jaringan distribusi di daerah kerjanya secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik untuk kinerja unit.

1.6 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasaran yang tersedia di tempat melaksanakan PKL yaitu di bagian Humas, tepatnya di tempatkan di perpustakaan yang merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Humas PT.PLN (Persero) Unit Distribusi Jawa Barat dan Banten, tersedia:

Tabel 1.1 Sarana Dan Prasarana Divisi Humas

PT PLN (Persero) Jawa Barat Dan Banten

NO	NAMA FASILITAS KERJA	JUMLAH	SATUAN	PENEMPATAN
1	Komputer Program Windows XP	5	unit	Operasional Humas
2	Komputer Program Windows XP	1	unit	Deputy Manajer Komunikasi
3	Komputer Program Windows XP	2	unit	Operasional PKBL
4	Komputer Program Windows XP	2	unit	Operasional Perpustakaan
5	Laptop	1	unit	Operasional Humas
6	Printer HP	3	unit	Operasional Humas
7	Printer HP	2	unit	Operasional PKBL
8	Printer HP	1	unit	Deputy Manajer Komunikasi
9	Printer HP	1	unit	Operasional Perpustakaan
10	Camera Digital	3	unit	Operasional Humas
11	Camera Non Digital	2	unit	Operasional Humas
12	Handycam	2	unit	Operasional Humas

13	Peralatan Audiovisual			
	- Televisi 29 Inch	1	unit	Operasional Humas
	- DVD Player	2	unit	Operasional Humas
	- VCD Player	1	unit	Operasional Humas
14	Peralatan Audio	1	unit	Operasional Humas

Sumber : Data Humas PT PLN (Persero) DJBB (print out)

Catatan :

PKBL : Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan

PRO : Public Relations Officer

1.7 Lokasi dan Waktu PKl

1.7.1 Lokasi Pkl

Pelaksanaan praktek kerja lapangan di lakukan di bagian HUMAS PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dan Banten, jalan Cikapundung Barat No 2 Bandung.

1.7.2 Waktu PKL

Pelaksanan praktek kerja lapangan di lakukan terhitung tanggal 2 Agustus 2004 sampai dengan 2 September 2004, di mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.00.